

Perempuan Sebagai Pemilih: Isu Utama, Preferensi, dan Dampaknya dalam Pemilu 2024

Women as voters: Main issues, Preferences and their impact on the 2024 election

Andri Rusta*, Adinda Charisma Nafisa, Bagas Islam Mahendra, Irawati & Mhd. Fajri

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Diterima: 08 Januari 2024; Direview; 13 Januari 2024; Disetujui: 27 Februari 2024

*Corresponding Email: Arusta@soc.unand.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan isu-isu utama, preferensi politik, dan dampak partisipasi perempuan sebagai pemilih dalam pemilu 2024 di Indonesia. Melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu studi literatur, analisis dilakukan terhadap kondisi kesetaraan gender dan kekerasan seksual di Indonesia, mempertimbangkan preferensi politik perempuan dalam pemilihan legislatif dan presiden, serta mendiskusikan dampaknya terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Ditemukan bahwa isu-isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual menjadi fokus utama perempuan dalam pemilu 2024. Preferensi politik perempuan cenderung dipengaruhi oleh faktor sosok sosiologis dan latar belakang calon. Partisipasi perempuan sebagai pemilih dapat membawa dampak positif dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap berbagai permasalahan perempuan. Penelitian ini juga menggarisbawahi dua hal, yakni pentingnya peran partai politik, caleg, dan capres sebagai kontestan dalam pemilu untuk menghadirkan solusi konkret terhadap isu atau permasalahan perempuan yang dikemas dalam bentuk program atau misi yang nyata. Kemudian, tulisan ini juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya dilihat dari prosedurnya saja, tetapi juga dari substansinya yang harus menjadi solusi atau jawaban atas permasalahan perempuan di Indonesia.

Kata Kunci: Perempuan; Isu; Preferensi; Pemilu.

Abstract

This article aims to depict the main issues, political preferences, and the impact of women's participation as voters in the 2024 elections in Indonesia. Through qualitative descriptive research with the methodology of literature review, an analysis is conducted on the conditions of gender equality and sexual violence in Indonesia, considering women's political preferences in legislative and presidential elections, and discussing their impact on the strengthening of democracy in Indonesia. It is found that gender equality and sexual violence issues are the primary focus for women in the 2024 elections. Women's political preferences tend to be influenced by the personality and background of candidates. The participation of women as voters can have a positive impact on creating policies that are responsive to various women's issues. This research also underscores two crucial aspects: the importance of the role of political parties, candidates, and presidential candidates as contestants in elections to present concrete solutions to women's issues packaged in tangible programs or missions. Additionally, this article emphasizes that the success of elections is not only seen in their procedures but also in their substance, which must provide solutions or answers to women's issues in Indonesia.

Keywords: Women; Issues; Preferences; Elections.

How to Cite: Nafisa, A.C., Mahendra, B.I., Rusta, A., Irawati., & Fajri, M., (2024), Perempuan Sebagai Pemilih: Isu Utama, Preferensi, dan Dampaknya dalam Pemilu 2024, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3): 1341 -1349



PENDAHULUAN

Demokrasi dapat diartikan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua komponen kata yakni *demos* yang memiliki arti rakyat dan *kratein* artinya kekuasaan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mana kekuasaannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan) (Zaini, 2018). Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, demokrasi berarti kekuasaan tertinggi yang berada pada rakyat dan rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan (Malik et al., 2021).

Salah satu instrumen yang tidak akan luput dari negara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilu karena pemilu merupakan bentuk implementasi dari demokrasi itu sendiri. Negara yang demokratis akan menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat karena pemilihan umum merupakan guna menghasilkan dan memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan, baik yang di tingkat Pusat (anggota DPR-RI dan DPD) maupun Daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Lembaga Perwakilan Rakyat atau legislatif baik di pusat maupun daerah idealnya diisi oleh orang yang dapat mewakili rakyat dan dapat menyampaikan aspirasi rakyat, termasuk juga aspirasi dari warga negara perempuan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah perempuan Indonesia adalah 135.542.018 jiwa atau sekitar 49% dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 270.203.917 jiwa. Artinya, jika kita berbicara kondisi ideal atau kondisi yang seharusnya terjadi maka seharusnya permasalahan yang dihadapi perempuan itu tidak akan banyak karena dapat diakomodir serta secara *responsive* dapat ditemukan resolusinya. Tetapi realita yang tengah terjadi saat ini berbeda, hal tersebut dikarenakan kondisi keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga perwakilan atau legislatif tdaik mencapai rasio yang sama dengan jumlah penduduk Indonesia berjenis kelamin perempuan. Dari 12 pelaksanaan pemilu, hasilnya memperlihatkan tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dalam konteks menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan.

Menurut Budiardjo (1981) partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satu bentuk atau contohnya ialah memberikan suara dalam pemilihan umum. Sementara itu menurut Huntington & Nelson (1994) partisipasi politik tindakan warganegara yang bermaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Almond & Verba (1984) berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh warganegara yang memiliki tujuan untuk menyeleksi pejabat negara dan tindakan yang mereka ambil. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, peneliti memaknai partisipasi politik melalui tiga kata kunci, yakni "memilih", "pemimpin", dan "kebijakan publik", yang bila dinarasikan berarti partisipasi politik adalah suatu upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik atau keputusan yang menyangkut kehidupan publik yang dibuat oleh para pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih secara konstitusi dan melalui mekanisme yang demokratis. Artinya, secara *das sollen* atau secara normatif, motivasi utama dari partisipasi politik seseorang adalah produk kebijakan publik yang mampu menyelesaikan masalah masalah atau isu di ruang publik.

Berbicara mengenai partisipasi politik perempuan sebagai pemilih, beberapa studi atau penelitian yang pernah dikaji menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor atau variabel yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan, seperti faktor adanya pemberian berupa barang atau uang (Darwin, 2017; Putra, 2017) isu-isu perempuan (Mahsun et al., 2021; Savirani et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Irtanto secara spesifik menunjukkan bahwa preferensi pemilih perempuan dipengaruhi oleh faktor sosiologis, psikologis, dan rasional (Irtanto, 2015). Selain itu, partisipasi politik perempuan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan akses yang dimiliki terhadap media (Siswanto et al., 2020; Yanti et al., 2023). Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang spesifik membahas mengenai dampak dari partisipasi politik perempuan sebagai pemilih.

Menuju pemilu tahun 2024, kelompok perempuan menjadi salah satu target potensial untuk mendulang suara. Faktanya adalah, setiap perhelatan Pemilu, kelompok perempuan di Indonesia selalu menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak. Terkhusus untuk pemilu 2024, kelompok perempuan menjadi kelompok mayoritas atau memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki berdasarkan rilis dari KPU RI dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional sejumlah 102.588.719. Jumlah yang lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki dengan jumlah 102.218.503.

Logika demokrasi representative adalah bahwa pemimpin atau wakil yang dipilih adalah mereka yang mewakili interes, motivasi, orientasi serta preferensi konstituennya. Wakil tersebut yang akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan konstituennya (Ulfiyyati et al., 2023). Dalam konteks partisipasi perempuan dalam politik, meskipun signifikansi yang diperoleh dari hanya sebatas memilih wakil atau pemimpin tidak lebih besar dibandingkan dengan berkecimpung langsung di dunia politik, namun faktanya, dampak perempuan sebagai pemilih bersifat non-instan tetapi eksponensial apabila dibarengi dengan peningkatan literasi politik perempuan itu sendiri. Dapat dilihat partisipasi politik perempuan sebagai pemilih secara progresif dan masif dapat menurunkan indeks ketimpangan gender serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif sehingga perempuan merasa adil dan aman. Ada hubungan yang bersifat relasional antara Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Demokrasi, dan Indeks *Women Peace and Security*. Negara yang memiliki Indeks Ketimpangan Gender yang rendah cenderung merupakan memiliki Indeks Demokrasi yang tinggi serta Koefisien Indeks *Women Peace and Security* yang hampir menyentuh angka 1 (baik).

Tabel 1 Elektabilitas Partai Politik berdasarkan Kelompok Perempuan

10 Negara dengan Indeks Demokrasi yang Tinggi	10 Negara dengan Ketimpangan Gender Terendah	8 Negara dengan Indeks WPS Hampir Sempurna (0-1)
Norwegia	Denmark	Denmark
Selandia Baru	Norwegia	Swiss
Finlandia	Swiss	Swedia
Swedia	Swedia	Finlandia
Islandia	Belanda	Luksemburg
Denmark	Finlandia	Islandia
Irlandia	Singapura	Norwegia
Taiwan	Islandia	Austria
Australia	Luxemburg	
Swiss	Belgia	

Sumber Tabel: Databooks dan Data Indonesia

Melihat fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana isu, preferensi, serta dampak perempuan sebagai pemilih dalam pemilu 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, deskripsi dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengemukakan fakta serta menganalisis mengenai isu utama, preferensi, dan dampak perempuan sebagai pemilih dalam pemilu tahun 2024.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka, mengumpulkan informasi, membaca, mencatat, dan mengolah data penelitian yang didapatkan dari buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari beberapa artikel ilmiah, artikel berita,

buku, dan jurnal yang membahas terkait perempuan sebagai pemilih dalam pemilihan umum (Hartanto & Dani, 2016). Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai sejumlah mahasiswa Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka pada bagian pembahasan akan difokuskan untuk membahas isu utama serta preferensi politik perempuan sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa perempuan lebih peka terhadap isu-isu seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesetaraan gender (Wei et al., 2021). Isu-isu tersebut menjadi prioritas bagi perempuan karena hal ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan keluarga mereka. Isu-isu tersebut yang kemudian akan dilihat apakah memiliki pengaruh terhadap preferensi politik perempuan tentang pemilu 2024. Pembahasan dalam artikel ini secara lebih detail akan dibahas sebagai berikut:

1) Isu Utama Pemilih Perempuan pada Pemilu 2024

Permasalahan yang kini muncul adalah dengan jumlah pemilih perempuan yang jumlahnya tidak sedikit ternyata masih belum bisa untuk menyelesaikan beberapa permasalahan fundamental dan mengakomodir beberapa kebutuhan kelompok perempuan dalam berbagai aspek. Hal itu terlihat dari data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia yang saat ini berada di peringkat ke-92 dari 146 Negara. IKG memiliki beberapa aspek atau dimensi diantaranya partisipasi dan kesempatan ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang politik. Aspek-aspek tersebut yang kemudian menjadi elemen pembentuk dari skor IKG itu sendiri (World Economic Forum, 2023).

Dalam aspek partisipasi dan kesempatan ekonomi, skor yang diperoleh Indonesia sebesar 0,674 atau berada di kisaran rata-rata global. Di bidang pendidikan serta kesehatan, skor yang diperoleh oleh Indonesia cukup tinggi yakni 0,97 namun masih berada di kisaran rata-rata global. Selanjutnya di bidang politik, Indonesia memperoleh skor yang rendah atau kategori di bawah rata-rata global dengan skor 0,169. Dari data tersebut, bidang politik merupakan bidang yang dapat dikatakan belum mampu untuk mengakomodir perempuan di sana. Jika melihat realita di Indonesia saat ini, perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam memasuki dunia politik yang menyebabkan representasi politik perempuan selalu rendah. Secara historis, sejak pemilu 1999-2014, tercatat jumlah keterwakilan perempuan di parlemen tidak mencapai angka 30% meskipun sudah ada langkah seperti affirmative action contohnya. Terbaru, dari 575 anggota legislatif untuk periode 2019-2024 hanya 20,5% perempuan yang lolos ke parlemen. Dari 118 anggota parlemen perempuan yang terpilih, hampir sebagian besar perempuan berasal dari dinasti politik. Belum ada figur perempuan yang memang berasal dari kalangan bawah yang juga merupakan aktivis, kriteria seperti itu nampaknya belum masuk ke dalam bursa calon anggota legislatif. Ketiadaan figure seperti ini bisa terjadi salah satu alasannya karena partai politik di Indonesia dalam menjalankan fungsi rekrutmennya masih memiliki kecenderungan bahkan memprioritaskan untuk merekrut anggota yang memiliki popularitas serta modal kapital yang besar.

Posisi perempuan di parlemen menjadi sangat penting tatkala sejatinya banyak sekali isu-isu perempuan yang saat ini kurang dipromosikan atau kurang dibahas. Seperti menurut Irene Yusiana Roba Putri yang menyayangkan apa yang pernah terjadi di Komisi VIII yang membiarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ditolak dan bahkan dianggap tidak menjadi perhatian mereka untuk diperjuangkan. Padahal, jika kita melihat keadaan perempuan sekarang, angka perempuan yang mengalami kekerasan di Tanah Air mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2021) yang berjumlah 27.000 menjadi 32.000 pada tahun 2022 dengan rincian, kekerasan seksual sebanyak 14.174 korban, kekerasan psikis sebanyak 11.230 korban, dan kekerasan fisik sebanyak 9.271 korban. Dari data tersebut, kekerasan seksual menjadi yang terbanyak.

Sementara itu, isu-isu mengenai hak atas pendidikan dan pekerjaan telah menjadi perhatian khusus bagi perempuan saat ini. Adanya keinginan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya tanpa ada diskriminasi terhadap gender. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 persentase kesenjangan upah antara buruh laki-laki dan perempuan mencapai 22,09 persen, dan merangkak naik daripada tahun sebelumnya

berjumlah 20,39 persen. Angka inilah yang kemudian memperkuat perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam bidang pekerjaan.

Di samping itu, isu mengenai cuti hamil dan melahirkan juga kerap dikemukakan oleh perempuan. Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang mengatur adanya tambahan cuti bagi ibu hamil dan melahirkan menjadi 6 bulan dan cuti untuk pekerja lelaki yang istrinya melahirkan, tidak berjalan dengan mulus dan tidak menemukan titik terang kapan disahkannya undang-undang tersebut. Aturan inipun juga menimbulkan penolakan dari sejumlah kalangan industri, termasuk dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang memandang hal tersebut akan berdampak kurang baik bagi kinerja perusahaan. Namun, Luluk Nur Hamidah sebagai anggota Komisi VI DPR RI menekankan pemerintah harus dapat bersikap tegas dan bisa menjembatani perjuangan para pekerja perempuan dan perusahaan. Luluk juga menambahkan, cuti hamil 6 bulan bagi pekerja perempuan yang melahirkan juga berdampak pada penurunan *stunting* dan malnutrisi bagi anak yang menjadi target pemerintah. Oleh karena itu, isu mengenai cuti hamil dan undang-undang yang mengatur akan hal ini masih terus diperjuangkan oleh kaum perempuan di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isu yang dihadapi oleh perempuan menjelang pemilu tahun 2024 mendatang adalah isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, kesempatan dalam politik, kekerasan seksual, dan isu kesejahteraan ibu dan anak. Diantara isu-isu tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai isu kesetaraan gender. Isu kesetaraan gender merupakan masalah hulu, atau sumber dari berbagai masalah. Masalah keterwakilan politik merupakan masalah hilirnya. Jika kita ingin menyelesaikan masalah hilir, yang diperlukan adalah mengatasi masalah hulunya terlebih dahulu. Menaruh perhatian yang lebih terhadap satu permasalahan di antara masalah yang lain tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Sebagai contoh, akan percuma saja rasanya ketika banyak sekali upaya untuk mendorong keterwakilan politik perempuan tetapi tidak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang aksesibel dan inklusif.

2) Preferensi Politik Perempuan pada Pemilu 2024

Preferensi politik dapat diartikan juga sebagai orientasi seseorang dalam menentukan pilihan politiknya. Berbeda dengan perilaku memilih, preferensi politik hanya mencakup domain kognitif dan afektif saja, sedangkan perilaku memilih itu sudah berlanjut ke domain konatif atau aksi. Berbicara mengenai preferensi politik perempuan pada pemilu tahun 2024 secara khusus akan mengarah kepada dua hal, yaitu pada konteks pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Pada pemilihan legislatif, meminjam data dari Litbang Kompas, menyebutkan bahwa kecenderungan perempuan dalam memilih atau menentukan pilihan dalam pileg didominasi oleh faktor partai politik dan calon anggota legislatifnya dengan persentase sebesar 42,3%. Sedangkan yang hanya mempertimbangkan partai politiknya saja memiliki persentase sebesar 12,2%. Lalu yang hanya mempertimbangkan calegnya saja memiliki persentase sebesar 30,8%. Namun, preferensi politik perempuan nasional tersebut tidak selamanya terefleksikan di level daerah, seperti yang terjadi di Jawa Tengah yang mana preferensi politik perempuannya masih dipengaruhi oleh faktor partai politiknya, jadi dalam posisi tersebut, Jawa Tengah masih dinilai sangat ideologis.

Sementara itu, elektabilitas partai politik di Indonesia menurut perempuan saat ini masih menempatkan PDI-P di posisi pertama, di posisi kedua terdapat partai Gerindra. Partai Gerindra merupakan partai dengan peningkatan elektabilitas yang cukup signifikan. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 2.

Tabel 2. Elektabilitas Partai Politik berdasarkan Kelompok Perempuan

Nama Partai	Elektabilitas Bulan Januari	Elektabilitas Bulan Mei	Elektabilitas Bulan Desember
PDI-P	19,9%	20,5 %	18,8 %
Partai Gerindra	12%	16,7 %	18,8%
Partai Demokrat	10%	8,3%	4,4%
Partai Golkar	11,6%	7,3%	9,2%
Partai Nasdem	7,3%	6,0%	4,1%
PKB	6,1%	5,8%	7,9%
PKS	4,8%	4,5%	4,9%

PAN	1,5%	4,5%	5,9%
Partai Perindo	3,5%	4,2%	2,6%
PPP	2,8%	3,2%	2,5%

Sumber tabel: Litbang Kompas

Beralih kepada preferensi politik perempuan pada Pilpres 2024, masih menggunakan data yang sama dari Litbang Kompas, menyebutkan bahwa pertimbangan utama perempuan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden didominasi oleh faktor siapa calon presidennya dibandingkan cawapresnya. Hal tersebut diakui 37,4 persen responden dari kalangan perempuan. Namun, 4 dari 10 perempuan menyebut lebih mempertimbangkan keduanya ketimbang hanya melihat capresnya saja. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan elektabilitas ketiga capres sepanjang survey yang dilakukan oleh Kompas di tahun 2023 menunjukkan dinamisasi, dinamisasi elektabilitas di antara ketiga calon presiden yang terdaftar dalam bursa pilpres dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sosok cawapres dan juga masih tingginya potensi *swing voters* di kalangan perempuan dengan persentase 43%. Tetapi jika dilihat dari hasil *survey* di Bulan Desember tahun 2024 menunjukkan bahwa Prabowo mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan hingga mengungguli Ganjar yang berada di urutan kedua, diikuti Anies sebagai capres pilihan perempuan.

Tabel 3 Elektabilitas Capres-Cawapres berdasarkan Kelompok Perempuan

Nama calon presiden	Elektabilitas Bulan Januari	Elektabilitas Bulan Mei	Elektabilitas Bulan Agustus	Elektabilitas Bulan Desember
Anies Baswedan	24,3%	21,6 %	22,1 %	17,5%
Ganjar Pranowo	34,1%	32,4%	33,7%	19,4%
Prabowo Subianto	23%	26,3%	26,8%	37,6%

Sumber Tabel Litbang Kompas

Lebih lanjut, dilihat dari aspek latar belakang, pemilih perempuan cenderung memilih capres yang memiliki latar belakang sebagai kepala daerah sebelumnya, baik itu gubernur, walikota atau bupati. Dari aspek personal, pemilih perempuan cenderung memilih capres yang memiliki pribadi yang sederhana dan merakyat. Tetapi jika dilihat dalam perspektif programatis, maka kita akan menelaah komitmen capres-cawapres dalam menjawab permasalahan dan menjamin kebutuhan kaum perempuan dan setiap capres-cawapres memiliki program atau agenda masing-masing yang dapat dilihat melalui tabel 4.

Jika dilihat *platform* atau program yang sudah dirancang oleh capres-cawapres dalam menjawab permasalahan perempuan tidak sepenuhnya mencerminkan bagaimana preferensi politik perempuan yang digambarkan melalui perolehan elektabilitas. Pasangan Anies-Muhaimin dipandang lebih memiliki program yang lebih konkrit dan lebih terintegrasi untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh perempuan, namun elektabilitasnya di kalangan pemilih perempuan justru tidak linear dan asimetris. Hal ini yang kemudian melahirkan anggapan serta gambaran bagaimana rasionalisasi perempuan dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilu 2024. Pemilih perempuan masih mempertimbangkan faktor sosiologis atau yang sering disebut juga sebagai aliran atau mazhab pemikiran Colombia. Dalam teori ini menyebutkan bahwa pilihan politik seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan pemilih (Prasetyawati & Adi, 2021). Preferensi politik seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau karakteristik geografis di mana individu tinggal (Yoserizal & A, 2009). Namun faktor sosiologis ini tidak bersifat absolut dan tidak berlaku secara *general*, seperti yang disebutkan tadi, perempuan masih mempertimbangkan faktor seperti latar belakang kandidat yang mana faktor ini berasal dari aliran atau mazhab rasional. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perempuan sudah berada di fase transisi paradigma dalam menentukan pilihan politiknya dari yang awalnya cenderung sosiologis dan mengikuti predisposisi lingkungannya (Hasriani et al., 2015), mulai mempertimbangkan faktor seperti latar belakang. Kemudian, kaitannya dengan pembahasan sebelumnya terkait dengan isu utama yang menyangkut perempuan pada pemilu 2024 adalah bagaimana partai politik, caleg dan capres memanfaatkan transisi pendekatan pilihan perempuan tersebut dengan mulai menaruh perhatian lebih kepada isu-isu seperti kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan.

Partai politik, caleg, dan capres harus mampu menerjemahkan isu yang memang terjadi ke dalam misi-misi atau program yang diusungnya.

Tabel 4. Daftar komitmen capres-cawapres melindungi perempuan dan anak

Anies-Muhaimin	Prabowo-Gibran	Ganjar-Mahfud
Menjamin kesetaraan pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam politik	Mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik	Program kartini maju meliputi upaya pemberian dukungan penuh terhadap pilihan perempuan di seluruh bidang pekerjaan dan profesi, serta penguatan afirmasi perempuan untuk mendapatkan akses wirausaha, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.
Program Ramah Ibu dan Anak	Perlindungan untuk tumbuh kembang anak, termasuk pemberian gizi yang cukup	Menambah cuti melahirkan, baik bagi ibu dan ayah dengan upah serta tunjangan 100 persen
Penguatan peran posyandu dan puskesmas serta aktivasi bidan dan kader kesehatan	Menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Memperbanyak tempat penitipan anak yang berkualitas, baik di sektor formal maupun di sektor informal,
Membuat layanan krisis yang di dalamnya terdapat nomor layanan darurat 24 jam, rumah aman, visum, pengobatan dan layanan psikologis gratis dan bantuan hukum gratis		Revitalisasi pendampingan terhadap korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Menegakkan aturan pelaksana UU TPKS		
Pemenuhan hak dasar anak yatim dan terlantar termasuk pendidikan dan kesehatan		

Sumber tabel: antara news

Setelah membicarakan mengenai apa isu utama dan preferensi politik perempuan pada pemilu 2024, pada bagian ini akan fokus membahas mengenai apa dampak dari partisipasi perempuan sebagai pemilih dalam pemilu. Sebagaimana yang kita tahu, perempuan dengan segudang permasalahan yang dihadapainya saat ini membutuhkan pemimpin atau wakil yang memang mampu mengentaskan permasalahan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada sejumlah mahasiswa Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas, berdasarkan wawancara, informan berpendapat bahwa dengan medium pemilu, setidaknya dapat mendorong wakil atau pemimpin yang mampu mewakili isu-isu terkait perempuan, dengan demikian ada peluang yang lebih besar untuk membuat suatu kebijakan yang lebih sensibel atau berperspektifkan gender. Jika hal tersebut terealisasi, maka secara substansial, pelaksanaan pemilu dapat dikatakan berhasil karena keberhasilan pemilu tidak hanya dilihat pada ranah prosedurnya saja, tapi secara substansi juga harus terpenuhi.

Pemilu yang secara substansial terlaksana, maka akan berimplikasi terhadap penguatan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Saat ini kondisi demokrasi di Indonesia dapat dibilang sedang tidak baik-baik saja karena status atau kategori demokrasi di Indonesia termasuk ke dalam kategori cacat, atau *Flawed Democracy* (Aulia, 2019). Hal ini dapat diketahui berdasarkan peringkat demokrasi di Indonesia yang berada di peringkat 54 berdasarkan data Economist Intelligence Unit (EIU). Demokrasi cacat ini umumnya sudah memiliki sistem pemilu, serta menghormati kebebasan sipil dasar. Namun, negara dalam kelompok ini masih memiliki masalah fundamental salah satunya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan semua pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam proses pemilihan memiliki dampak signifikan terhadap arah kebijakan dan representasi politik. Mulai dari pemaparan isu utama yang dihadapi oleh perempuan menjelang Pemilu 2024 yaitu ketidaksetaraan gender dan kekerasan seksual. Meskipun perempuan merupakan mayoritas pemilih, keterwakilan politik perempuan masih rendah, dan isu-isu perempuan seringkali kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Partisipasi perempuan sebagai pemilih memiliki dampak penting dalam menentukan arah kebijakan dan representasi politik. Melalui Pemilu, perempuan memiliki peluang untuk memilih pemimpin atau wakil yang dapat mewakili dan memperjuangkan isu-isu terkait perempuan. Hal ini setidaknya dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap gender dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Maka dari itu, dalam menyikapi isu-isu tersebut, partai politik, caleg, dan capres diharapkan dapat lebih memperhatikan isu-isu yang memang inheren dan relevan dengan perempuan seperti kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan dalam program dan misi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A., Verba, S. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. bina aksara.
- Aulia, Y. (2019). Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura. *Padjadjaran Law Review*, 7, 1–14.
- Budiardjo, M. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik*. Gramedia.
- Darwin, R. L. (2017). The power of female brokers: Local elections in North Aceh. *Contemporary Southeast Asia*, 39(3), 532–551. <https://doi.org/10.1355/cs39-3g>
- Hartanto, R. S. W., & Dani, H. (2016). Studi Literatur: pengembangan media pembelajaran dengan software autocad. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, 1(1), 1–6.
- Hasriani, H., Madani, M., & Handam, H. (2015). Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 52–65. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.106>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta.
- Irtanto, I. (2015). Perilaku Politik Pemilih Perempuan Kota Mojokerto Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(2), 115–128. <https://doi.org/10.20422/jpk.v18i2.41>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mahsun, M., Elizabeth, M. Z., & Mufrikah, S. (2021). Female Candidates, Islamic Women's Organisations, and Clientelism in the 2019 Indonesian Elections. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 73–92. <https://doi.org/10.1177/1868103420988729>
- Malik, G. A., Pratama Maso, M. S. P., Akbar, M. Z., & Fathona, S. (2021). Penerapan Demokrasi Berkeadaban Dalam Kebudayaan Dan Tradisi Suku Bugis. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 701–707. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1987>
- Prasetyawati, A., & Adi, A. S. (2021). Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Pada Masa Pandemi Covid - 19 Di Kota Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 309–323. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n2.p309-323>
- Putra, H. S. (2017). Determinants of Vote Buying in Local Head Election in Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs*
- Savirani, A., Al Akbar, N., Jamson, U. N. E., & Asworo, L. (2021). Floating Liberals: Female Politicians, Progressive Politics, and PSI in the 2019 Indonesian Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 116–135. <https://doi.org/10.1177/1868103421989084>
- Siswanto, J., Lydia, E., Agustina, S., & Alamsyah, A. (2020). Media access, collective efficacy, and vote buying among female voters during local leader elections in Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 09(01), 3221–3227.
- Ulfiyati, A., Muhammad, R., Barri Fathur, M., & Akbari Sultan, I. (2023). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advance in Social Humanities Research*, 1(4 Juni), 435–444.
- Wei, W., Sarker, T., Żukiewicz-Sobczak, W., Roy, R., Monirul Alam, G. M., Rabbany, M. G., Hossain, M. S., & Aziz, N. (2021). The influence of women's empowerment on poverty reduction in the rural areas of Bangladesh: Focus on health, education and living standard. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(13), 1–18. <https://doi.org/10.3390/ijerph18136909>
- World Economic Forum. (2023). Insight Report. In *World Economic Forum* (Issue June).

- Yanti, M., Malinda, F., & Tamsyah, I. (2023). Why does female voters prefer vote buying in local head elections? *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 107–122. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.107-122>
- Yoserizal, & A, A. (2009). Preferensi dan Rasionalisasi Pilihan Politik Perempuan Minang Perkotaan di Kota Padang terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Demokrasi*, 2, 187–204.
- Zaini, A. (2018). Demokrasi: Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas. *Al-Ahkam*, 14(2), 25. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1485>

